

## **STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DESA CIBINGBIN MENUJU *ENTREPRENEURS VILLAGE* BERBASIS SUMBERDAYA ALAM**

**Asep Hamzah<sup>1)</sup>**

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM.3 Desa Pabuaran, Kecamatan Cipocok, Kabupaten Serang  
Email: asep.hamzah@untirta.ac.id

### **Abstrak**

Desa Cibingbin memiliki letak yang sangat strategis dalam pergerakan manusia dan aktivitas ekonomi di bagian selatan Provinsi Banten. Berada diantara pusat aktivitas ekonomi seperti Binuangeun, Sumur, Labuan dan Citeureup, Desa Cibingbin memiliki potensi sebagai desa penyangga. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah menjadikan Desa Cibingbin sebagai *entrepreneurs village* berbasis sumberdaya alam. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk merancang strategi pengembangan Desa Cibingbin menjadi entrepreneur village yang berbasis pada sumberdaya alam yang dimiliki. Hasil pengabdian antara lain Kemudahan dalam Akses Permodalan, Bantuan Pembangunan Prasarana, Pengembangan Skala Usaha, Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Akses Teknologi. Selain hal tersebut, diperlukan juga peran stakeholder terkait agar UMKM di Desa Dicingbin dapat berkembang, antara lain: Badan Usaha Milik Desa (BUMN), Pemerintah Daerah, Kepala Desa/Kelurahan, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Wirausaha Implementasi UMKM pedesaan terhadap wirausahawan desa yang mampu bersaing secara global.

**Kata Kunci:** Entrepreneur village, *Desa Cibingbin*, *UMKM*

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia kini tengah berpacu dalam pasar global atau disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai pada tahun 2015. Tingginya populasi usia produktif di Indonesia tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat Indonesia berlomba-lomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian. Maka tidak heran, kini mulai bermunculan pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi rakyat. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah persaingan perdagangan bebas sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dewasa ini, Perkembangan UMKM jumlahnya telah

meningkat pesat, UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 96,66% terhadap total keseluruhan tenaga kerja nasional, sedangkan usaha besar hanya memberikan kontribusi rata-rata 3,32% terhadap tenaga kerja nasional. Tingginya kemampuan UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja mengindikasikan bahwa UMKM memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di seluruh wilayah tanah air. Namun di sisi lain, UMKM memiliki banyak kendala yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberian informasi dan jaringan pasar, kemudahan akses pendanaan, pendampingan serta peningkatan kapasitas teknologi informasi adalah upaya peningkatan daya saing UMKM Indonesia. 1 Dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Daerah, pembinaan terhadap kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menggerakkan usaha-usaha ke arah tercapainya sasaran pembangunan ekonomi yang berupa penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi harus mengarahkan adanya suatu hasil atau pemerataan sejajar antar wilayah di daerah. Ketidakseimbangan struktural dan ekonomi cenderung terjadi di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, menganalisis ketidakseimbangan pembangunan khususnya di daerah pedesaan perlu menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah. Di pedesaan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah, hidup

dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional, infrastruktur dan akses pemerintahan masih terbatas. Indonesia yang terdiri dari 72.000 desa memiliki potensi sangat besar dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu faktor utama pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat masyarakat harus menghadapi tantangan global. Maka dari itu, kelompok wirausahawan desa (Entrepreneurs Village) sebagai potret pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang efektif memudahkan masyarakat untuk siap bersaing dalam pasar global. Dengan meningkatkan kualitas produk-produk lokal akan menambah nilai jual UMKM, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia.

Pengembangan wirausahawan desa ini dilakukan melalui kegiatan KKM. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan wadah pembelajaran bagi mahasiswa dalam memberdayakan serta mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerah, khususnya yang ada di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. KKM merupakan kegiatan 'nyata' yang wajib untuk dilaksanakan oleh mahasiswa dalam penerapan Tri Dharma perguruan tinggi dengan

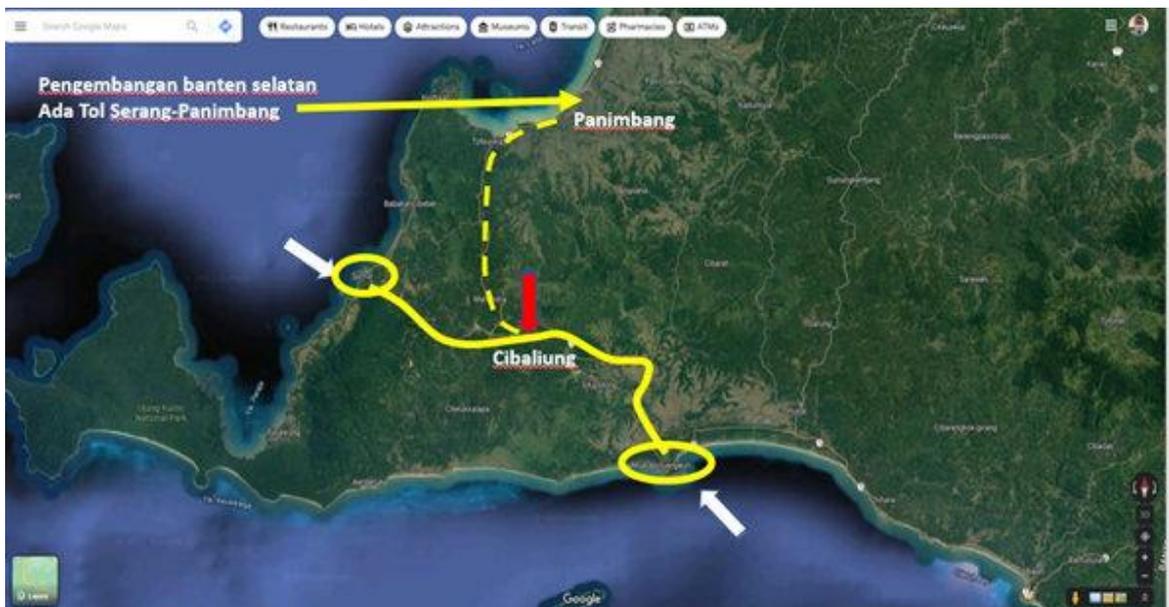
mengaplikasikan pengalaman belajar serta menuangkannya dalam berbagai program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

## 1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan Desa Cibingbin untuk menjadi entrepreneur village.

## PROFIL DESA

Desa cibingbin merupakan salah satu dari 9 (sembilan) desa di Kecamatan Cibaliung. Posisi Desa Cibingbin sangat strategi dan dekat dengan pusat kegiatan ekonomi seperti Ujung Kulon, Binuangeun, Sumur, dan Citeureup. Desa Cibingbin sangat strategi dalam kegiatan ekonomi di Bagian Selatan Provinsi Banten , memiliki jarak 104 Km ke ibu kota Provinsi, 30 km ke binuangeun, 38 km ke kawasan konservasi ujung kulon, 30 km ke Kecamatan Sumur, dan 34 km ke Panimbang. Selain jarak desa cibingbin ke pusat aktivitas ekonomi relatif dekat, desa cibingbin juga dilalui oleh berbagai macam kendaraan dan aktivitas. Kedua titik pusat aktivitas ekonomi terdekat adalah kawasan Sumur – Panimbang yang berada di Selat Sunda dan Muara Binuangeun di bagian selatan yang berhadapan dengan Samudera Hindia. Kedua pusat aktivitas ekonomi ini, baik itu sumur panimbang dengan muara binuangeun memiliki karakteristik yang serupa, yaitu aktivitas perikanan dan wisata. Satu-satunya jalur untuk perpindahan dari Sumur-Panimbang ke bagian selatan.



Gambar 1. Lokasi Desa Cibingbin

Untuk menuju desa yang berdaya saing, maka beberapa program dari kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 88 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, melakukan 3 program prioritas, yaitu pengembangan UMKM Desa Cibingbin menuju Entrepreneur Village.

## 1. METODOLOGI

Lokasi untuk diadakannya kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik Gelombang 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelompok 88 pada tahun 2022 ini adalah di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Waktu pelaksanaan KKM Tematik tahun ini adalah selama satu bulan yaitu mulai tanggal 18 Juli - 18 Agustus 2021. Program kerja kami dilakukan secara langsung melalui interaksi dengan masyarakat dan penyuluhan secara langsung terhadap pelaku UMKM, dan Pemerintah Desa setempat.

## 2. HASIL KEGIATAN

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah

penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja ([www.smeccda.com](http://www.smeccda.com)).

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Karena potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Susilo dan Krisnadewara (2007) menyatakan bahwa hasil riset yang dilakukan untuk pengembangan UMKM adalah berproduksi dengan fasilitas/peralatan terbatas,

berproduksi dengan jumlah bahan baku terbatas, berproduksi dengan jumlah tenaga kerja terbatas, berproduksi dengan modal finansial terbatas, membuka showroom/outlet, melakukan usaha sampingan. Rekomendasi dari hasil kajian ini berkaitan dengan upaya percepatan pemulihan kembali untuk berusaha melakukan kegiatan produksi kembali yang menekankan pada tambahan modal. Dengan tambahan modal maka berbagai keterbatasan dalam kegiatan produksi dapat diatasi, sehingga kegiatan produksi akan lebih lancar sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Menurut Priyono (2004), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi : Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana.

Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, juga merupakan

tanggung jawab masyarakat, terutama mereka yang telah lebih maju, karena telah terlebih dahulu memperoleh kesempatan bahkan mungkin memperoleh fasilitas yang tidak diperoleh kelompok masyarakat lain.

Rekomendasi Strategi Pengembangan UMKM di Pedesaan Pembangunan masyarakat pedesaan diarahkan pada program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, berikut beberapa pilihan strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM, yaitu:

**a. Kemudahan dalam Akses Permodalan.**

Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UMKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan

**b. Bantuan Pembangunan Prasarana.**

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan UMKM adalah

pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah.

**c. Pengembangan Skala Usaha.**

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Kemudian jika pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**d. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha.**

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun

pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam realitasnya masih belum berjalan optimal. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UMKM di Indonesia.

**e. Pengembangan Sumber Daya Manusia.**

Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha Mikro, kecil, dan Menengah di Indonesia adalah karena kurangnya ketrampilan sumber daya manusia. Manajemen yang ada relatif masih tradisional. Oleh karena itu, dalam pengembangan UMKM perlu meningkatkan pelatihan baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembangan usaha.

**f. Peningkatan Akses Teknologi**

**Penguasaan teknologi** merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di negara-negara maju keberhasilan usaha kecil menengah ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan teknologi. Strategi yang perlu dilakukan dalam

peningkatan akses teknologi bagi pengembangan UMKM adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain hal di atas, diperlukan juga peran stakeholder terkait agar UMKM di Desa Dicingbin dapat berkembang, antara lain:

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMN) : Memacu pertumbuhan UMKM dengan meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri agar dapat berperan dalam perekonomian nasional.
- b. Pemerintah Daerah : Memberi dukungan dengan memberikan saran terkait proses pemetaan UMKM dan menyiapkan anggaran dalam jangka panjang untuk program pembinaan dan pengembangan UMKM.
- c. Kepala Desa/Kelurahan : Memberikan dukungan pemahaman dan pengertian kepada para Wirausaha dan masyarakat tentang pentingnya pemetaan UMKM berdasarkan sektor-sektor ekonomi agar lebih mudah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM.
- d. BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa :

Memberikan dukungan data dengan membantu kesediaan wirausaha dalam mendukung program pemetaan UMKM berdasarkan sektor-sektor ekonomi.

- e. Wirausaha : Memberi dukungan wirausaha sangat membantu dalam mempercepat proses informasi data UMKM.

Langkah-langkah Strategi Pengembangan UMKM Menuju Entrepreneurs Village Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pencapaian tujuan gagasan adalah:

- a. Mengadakan koordinasi dan konsultasi secara intensif mengenai strategi pengembangan UMKM terhadap seluruh lapisan masyarakat pedesaan.
- b. Menjelaskan pentingnya menggali potensi pendapatan asli daerah dari rencana pembangunan desa yang dilakukan serta dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan ini.
- c. Menggunakan pendekatan umpan balik untuk memberikan pemahaman dan kerja sama kepada para pihak pemangku kepentingan yang terkait untuk membantu menyediakan fasilitas yang membantu kegiatan kewirausahaan.
- d. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi wirausahawan desa (Entrepreneurs Village) untuk persiapan menghadapi persaingan di pasar global.
- e. Melakukan pelatihan calon Entrepreneurs Village yang tangguh, mandiri, dan handal dalam pasar global oleh tim yang

bersangkutan.

- f. Implementasi UMKM pedesaan terhadap wirausahawan desa yang mampu bersaing secara global.

### 3. KESIMPULAN

Hasil pengabdian antara lain Kemudahan dalam Akses Permodalan, Bantuan Pembangunan Prasarana, Pengembangan Skala Usaha, Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Akses Teknologi. Selain hal tersebut, diperlukan juga peran stakeholder terkait agar UMKM di Desa Dicingbin dapat berkembang, antara lain: Badan Usaha Milik Desa (BUMN), Pemerintah Daerah, Kepala Desa/Kelurahan, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Wirausaha Implementasi UMKM pedesaan terhadap wirausahawan desa yang mampu bersaing secara global.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. Modul Pelatihan Nasional Kewirausahaan. Jakarta: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Anonim. 2012. Terampil Menyusun Rencana Bisnis. Jakarta: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Anwar, RK., dan Agus, R. 2017. Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus Pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat. Vol. 6(3): 204 – 208
- Badan Pusat Statistika. (2013). Data Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, 103 Pengangguran, TPAK dan TPT, 1986–2013 . Diakses dari (<http://www.bps.go.id/> pada tanggal 12 Januari 2016 jam 14.35 WIB).
- Firmansyah, MM, Dr. Drs.Ec. M. Anang. 2015. Peran Kewirausahaan di Indonesia dalam memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- Galeri UKM. 2011. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Online),(<http://galeriukm.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm>, diakses 1 oktober 2011).
- Ramadhan, A. (2005). Seri Pelajaran Komputer Internet dan Aplikasinya. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sudaryanto dan Hanim, Anifatul. 2002. Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002.
- Suryana. (2006). Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat.